

2022



LAPORAN KINERJA

**DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH**
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukunganbidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2023

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Drs. H. ULIZAR ADNAN, M. Si
NIP. 19630717 198903 1 009



Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi; (target indikator tercapai)

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Persentase pertumbuhan koperasi, Formulasi Perhitungan :

$$\frac{(\text{Jumlah Koperasi Tahun 2022} - \text{Jumlah koperasi Tahun 2021}) \times 100\%}{\text{Jumlah koperasi Tahun 2021}}$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase Pertumbuhan Koperasi} &= \frac{(1.150 - 1.116)}{(1.116)} \times 100\% \\ &= 3,05\%\end{aligned}$$

b. Meningkatnya Pertumbuhan UKM, Formulasi Perhitungan :

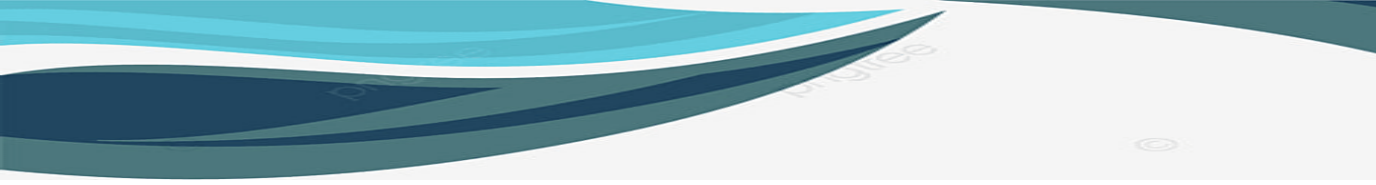
$$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022} - \text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021}) \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021}}$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase Pertumbuhan UMKM} &= \frac{(3.208 - 2.900)}{(2.900)} \times 100\% \\ &= 10,61\%\end{aligned}$$

- Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 3 (tiga) Program, yakni Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
- Capaian indikator (b.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM.
- Target capaian indikator sasaran (a) tahun 2022 sebesar 2%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 3,05%. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 152,50%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 2,67% terjadi peningkatan sebesar 114,23%.
 - Target capaian indikator sasaran (b) tahun 2022 sebesar 0,014%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 10,61%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target, hal ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait kriteria usaha, mikro, kecil, menengah dan besar melalui peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menggantikan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 100%.
2. Capaian sasaran strategis 2. Meningkatnya Kualitas SDM KUKM untuk indikator yang target kinerjanya tidak tercapai
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase SDM KUKM yang terlatih, Formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat}}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}} \times 100\%$$
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 1,8%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 0,217%. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 12,06%.
 - Tidak tercapainya target ini dikarenakan kurangnya antusias pengurus Koperasi dan Pelaku UKM untuk mengikuti pelatihan yang mengakibatkan turun dan rendahnya peserta pelatihan dari pelaku koperasi dan UKM.



Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Rendahnya daya saing SDM koperasi dan pelaku UKM
2. Masih rendahnya akses permodalan dan finansial pada pelaku UKM dan Koperasi
3. Kurangnya Inovasi teknologi terkait pengembangan produk UKM
4. Kurangnya Akses promosi dan pemasaran terhadap terhadap produk UKM
5. Masih rendahnya standarisasi produk dan perijinan para pelaku UKM dan Koperasi

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	10
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	14
1.3 Isu-isu Strategis.....	15
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	15
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	22
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	24
2.3 Struktur Program dan Kegiatan 2022	25
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	30
3.2. Efisiensi Anggaran.....	40
3.3. Inovasi.....	42
3.4. Penghargaan.....	42
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	45

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	16
Tabel I.2	Sarana-Prasarana.....	17
Tabel I.3	Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022	19
Tabel I.4	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021.....	19
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2017-2022	23
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	24
Tabel II.3	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	25
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.....	28
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Tahun 2022	29
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2022.....	31
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Kinerja 1	32
Tabel III.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 1	33
Tabel III.5	Formula Perhitungan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	34
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Kinerja 2	36
Tabel III.7	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 2	37
Tabel III.8	Formula Perhitungan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	38
Tabel III.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022	41



Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja	11
Gambar I.2. Peta Proses Bisnis	12
Gambar I.3. Struktur Organisasi	13
Gambar I.4. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	14

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

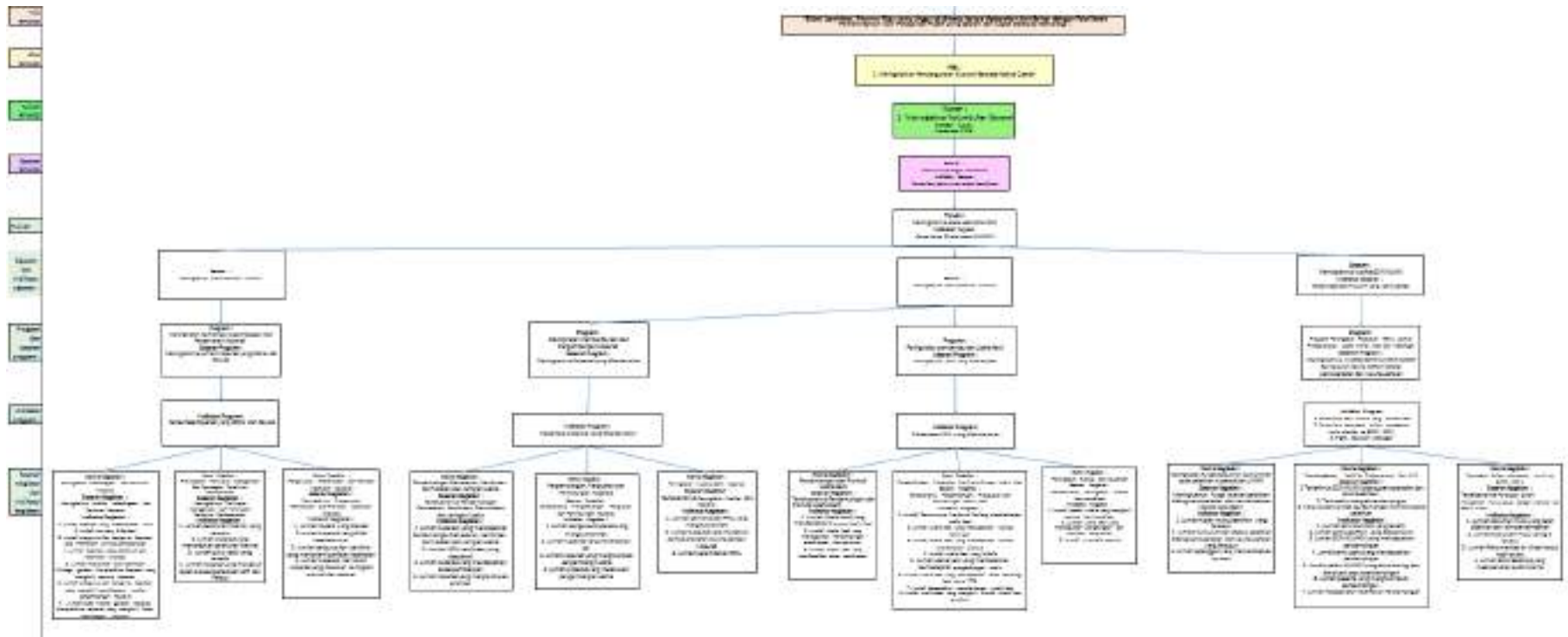
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
CASCADING KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM



Ket : Cascading lengkap dapat dilihat melalui link :

Gambar I.2 Peta Proses Bisnis
PETA PROSES BISNIS DINAS KOPERASI DAN UKM

IDENTIFIKASI PETA PROSES

PETA PROSES (KODE)	SUB PETA PROSES		STRATEGI PROGRAM		PETA UNTAS FUNGSI	
	KODE	SUB PETA PROSES	PROGRAM	KODE	CFM	BIDANG
Meningkatnya pertumbuhan Volume Usaha KUKM (DKUKM.02)	DKUKM.02.01	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Pengawasan dan Pementasan Koperasi	DKUKM.02.01.CFM.04	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	BIDANG KOPERASI
			Pembudayaan dan Perlindungan Koperasi	DKUKM.02.01.CFM.05	Pembudayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	BIDANG KOPERASI
			Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	DKUKM.02.01.CFM.06	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	BIDANG KOPERASI
	DKUKM.02.02	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Kecil	Pembudayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DKUKM.02.02.CFM.07	Pembudayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelambagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemasngku Kepentingan	BIDANG PEMBUDAYAAN USAHA KECIL
			Peningkatan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DKUKM.02.02.CFM.08	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KECIL
	DKUKM.02.03	Meningkatnya Kualitas SOM KUKM	Pendidikan dan Pelatihan Perkooperasian	DKUKM.02.03.CFM.09	Pendidikan dan Latihan Perkooperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	BALAI LATIHAN KOPERASI

Ket : Peta Proses Bisnis lengkap dapat dilihat melalui link :

Gambar I.3 Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UKM



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.4.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Adapun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PETA JABATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BNAGKA BELITUNG	
JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
JABATAN STRUKTURAL ESELON II : 1 Orang ESELON III : 5 Orang ESELON IV : 5 Orang JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA : 3 Orang AHLI MUDA : 11 Orang TERAMPIL : 1 Orang	JABATAN PELAKSANA : 27

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Volume Usaha KUKM”, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UKM;
2. Masih rendahnya kemampuan SDM Koperasi dan UKM;
3. Minimnya jaringan usaha baik UKM maupun koperasi;
4. Belum optimalnya fasilitasi akses sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;
5. Belum standarnya desain *packaging* produk KUKM;
6. Masih terbatasnya fasilitasi pemasaran produk KUKM;
7. Belum terjalin sinergitas pembinaan dan pengembangan KUKM dengan OPD pada kabupaten/kota;
8. Masih kurangnya pembinaan terhadap calon eksportir dan pelaku promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah;
9. Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan;
10. Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;
11. Lemahnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak;
12. Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran padatahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL	11	6	5	0	0	11	1	6	4	0	0	7	4
1	Eselom II	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
2	Eselon III	5	3	2	0	0	5	1	3	1	0	0	2	3
3	Eselon IV	5	2	3	0	0	5	0	2	3	0	0	4	1
B	JABATAN FUNGSIONAL	19	4	12	1	2	16	0	4	10	1	1	11	5
1	Ahli Madya	3	1	2	0	0	3	0	1	2	0	0	3	0
2	Ahli Muda	13	3	9	1	0	12	0	3	8	1	0	8	4
3	Ahli Pertama	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Terampil	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1
C	JABATAN PELAKSANA	27	0	12	6	9	27	0	0	12	6	9	15	12
D	PHL	39	0	13	3	23	23	0	0	13	3	23	28	11

Sumber : Data Kepegawaian Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 39 orang (41,94%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 33 orang (35,48%), S2 sebanyak 10 orang (10,75%), D3 sebanyak 10 orang (10,75%), S3 sebanyak 1 orang (1,06%), SLTP sebanyak 0 orang (0%), dan SD sebanyak 0 orang (0%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	TANAH		304.380.541
	TANAH	1	304.380.541
2	PERALATAN DAN MESIN		4.448.993.568
	ALAT BESAR	-	0
	ALAT ANGKUTAN	12	738.112.500
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	0
	ALAT PERTANIAN	-	5.267.457,50
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	75	2.746.693.982,50
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	-	185.210.218
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	0
	ALAT LABORATORIUM	-	0
	ALAT PERSENJATAAN	-	0
	KOMPUTER	35	731.203.400
	ALAT EKSPLORASI	-	0
	ALAT PENGEBORAN	-	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	42.469.000
	ALAT PERAGA	-	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	0
	RAMBU – RAMBU	-	0
	PERALATAN OLAH RAGA	3	0
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		15.100.223.500
	BANGUNAN GEDUNG	3	14.705.523.500

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
	MONUMEN	-	0
	BANGUNAN MENARA	-	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	394.700.000
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		805.105.000
	JALAN DAN JEMBATAN	-	198.500.000
	BANGUNAN AIR	-	406.900.000
	INSTALASI	-	172.286.000
	JARINGAN	-	27.419.000
5	ASET TETAP LAINNYA		9.997.500
	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	9.997.500
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-	0
	HEWAN	-	0
	BIOTA PERAIRAN	-	0
	TANAMAN	-	0
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	0
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	0
6	KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan		699.154.500
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	699.154.500
7	ASET LAINNYA		199.044.000
	ASET TAK BERWUJUD	-	0
	ASET LAIN-LAIN	-	199.044.000

Sumber : Buku Inventaris Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Kendaraan operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 2 unit kendaraan operasional, 8 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai namun perlu perbaikan dan perawatan yang intensif. Hanya saja sebanyak 30 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000-an awal yang spesifikasinya sudah jauh

tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga kurang mendukung untuk tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2021	16.920.623.078,-	716.952.980,-	0,-	0,-	17.637.576.058,-
2022	22.243.963.903,-	68.441.757,-	0,-	0,-	22.312.405.660,-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 dibanding tahun 2021 terdapat kenaikan Total anggaran belanja sebesar Rp 4.674.829.602. Hal ini menunjukkan **ada kendala** anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/040/LHE/INPTD tanggal 31 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya pemenuhan penyediaan data terhadap dokumen yang belum ada data pada IKK Output capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatkan target kinerja pada indikator presentase koperasi baru dan persentase pertumbuhan UKM masih relatif rendah 	<p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2021 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi terkait perijinan, kepengurusan dan pengawasan koperasi dan UKM. 2. Melakukan pembinaan terhadap pelaku UKM baik yang baru maupun yang lama sebagai upaya pendampingan terhadap pengembangan Koperasi dan UKM

		3. Memaksimalkan pendataan lengkap koperasi dan UKM melalui aplikasi Sidulang Babel dan ODS Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk memberikan data yang valid terkait koperasi dan UKM.
--	--	--

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya skala usaha KUKM (Sasaran RPJMD yang diampu PD) Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah “Meningkatnya skala usaha KUMKM”.

Adapun sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra	Ket
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	%					2	2	2	
2.	Meningkatnya pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	%					0.014	0.014	0.014	
3.	Meningkatnya kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang berkualitas	%					32	32	32	
4.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	%					80	80	80	

Sumber : Renstra Perubahan Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pertumbuhan Koperasi	1.1. Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Perizinan Koperasi. 1.2. Meningkatkan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian. 1.3. Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	1.1.1. Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Perizinan Koperasi. 1.1.2. Meningkatkan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian. 1.1.3. Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
2. Meningkatkan pertumbuhan KUMKM	2.1. Terlaksananya Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha 2.2. Terlaksananya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi. 2.3. Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 2.4. Terlaksananya Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil. 2.5. Terlaksananya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil. 2.6. Terlaksananya Peningkatan kualitas kewirausahaan	2.1.1. Terlaksananya Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha 2.2.1. Terlaksananya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi. 2.3.1. Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 2.4.1. Terlaksananya Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil. 2.5.1. Terlaksananya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil. 2.6.1. Terlaksananya Peningkatan kualitas kewirausahaan
3. Meningkatkan kualitas SDM KUMKM	3.1. Terlatihnya SDM KUMKM bidang perkoperasian dan kewirausahaan. 3.2. Tercapainya target pendampingan 3.3. Terevaluasinya hasil pendampingan KUMKM pasca pelatihan	3.1.1. Terlatihnya SDM KUMKM bidang perkoperasian dan kewirausahaan. 3.1.2. Tercapainya target pendampingan 3.1.3. Terevaluasinya hasil pendampingan KUMKM pasca pelatihan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3.4. Meningkatnya Penerapan Mutu pelatihan KUMKM 3.5. Terlaksananya Penerapan Sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015	3.1.4. Meningkatnya Penerapan Mutu pelatihan KUMKM 3.1.5. Terlaksananya Penerapan Sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015

Sumber : Renstra Perubahan Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	1.1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	34.359.681	34.359.681	0
	1.1.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	34.359.681	34.359.681	0
	1.2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	89.358.150	96.173.098	(6.814.948)
	1.2.1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	89.358.150	96.173.098	(6.814.948)
	1.3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	154.697.416	151.428.316	3.269.100

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
	1.3.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	164.697.416	151.428.316	3.269.100
2. Meningkatkan Pertumbuhan UKM	2.1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	676.135.000	1.653.027.794	(976.892.794)
	2.1.1. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	676.135.000	1.653.027.794	(976.892.794)
	2.2. Program Pengembangan UMKM	375.973.588	6.145.553.447	(5.769.579.859)
	2.2.1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	375.973.588	6.145.553.447	(5.769.579.859)
3. Meningkatkan Kualitas SDM KUKM	3.1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2.469.963.975	2.469.783.711	180.264
	3.1.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.469.963.975	2.469.783.711	180.264
4. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.910.585.111	11.762.079.613	(851.494.502)
	4.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.688.616	44.397.000	2.291.616
	4.1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.991.649.738	8.758.759.009	(767.109.271)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
	4.1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.299.000	39.299.000	0
	4.1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	660.288.272	763.524.547	(103.236.275)
	4.1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	68.441.757	(68.441.757)
	4.1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.855.884.485	1.768.883.300	87.001.185
	4.1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.775.000	318.775.000	(2.000.000)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		14.711.072.921	22.312.415.660	(7.601.342.739)

Sumber : DPPA Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)		
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	%	2%	Triwulan I	0,5 %
					Triwulan II	0,5 %
					Triwulan III	0,5 %
					Triwulan IV	0,5 %
2.	Meningkatnya Pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	%	0,014%	Triwulan I	0,0015%
					Triwulan II	0,0015%
					Triwulan III	0,003%
					Triwulan IV	0,008%
3.	Meningkatnya Kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang terlatih	%	32%	Triwulan I	0%
					Triwulan II	1 %
					Triwulan III	1 %
					Triwulan IV	30 %
4.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	%	80%	Triwulan I	15%
					Triwulan II	15%
					Triwulan III	15%
					Triwulan IV	35%

Sumber : Renstra Perubahan Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Pada tahun 2022, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)		
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	%	2%	Triwulan I	0,3 %
					Triwulan II	0,8 %
					Triwulan III	0,6 %
					Triwulan IV	0,3 %
2.	Meningkatnya Pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	%	0.014%	Triwulan I	0,0015%
					Triwulan II	0,0015%
					Triwulan III	0,003%
					Triwulan IV	0,008%
3.	Meningkatnya Kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang terlatih	%	1,8%	Triwulan I	0,1 %
					Triwulan II	0,7 %
					Triwulan III	0,7 %
					Triwulan IV	0,3 %
4.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	%	80%	Triwulan I	15%
					Triwulan II	15%
					Triwulan III	15%
					Triwulan IV	35%

Sumber : Rencana Aksi Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran berkurang/bertambah 51,67 % sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk pembiayaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022 melalui Kebijakan Pemerintah pusat PMK No 170 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk penanganan Inflasi Daerah tahun 2022.
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga, yaitu:
 - 3.1. BTT : Rp. 0,- (Dinas Koperasi dan UKM tidak mendapat alokasi dana BTT)
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu:
 - 4.1. Program Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi : Rp. 3.681.720.000,-

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA /KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	%		2,67	2	3.05	152,5		2
		$\frac{(\text{Jumlah Koperasi Tahun 2022} - \text{Jumlah Koperasi Tahun 2021}) \times 100\%}{\text{Jumlah Koperasi Tahun 2021}}$								
2	Meningkatnya Pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	%			0,014	10,61	100		0,014
		$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022} - \text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021}) \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021}}$								
3	Meningkatnya Kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang terlatih	%			1,8	0,217	12,06		1,8
		$\frac{\text{Jumlah SDM KUKM yang bersertifikat} \times 100\%}{\text{Jumlah SDM KUKM seluruhnya}}$								
4	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	%			80%				80%
		Nilai RB								

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran Kinerja :

Kinerja sasaran 1 : “Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi” diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan koperasi; Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Kinerja 1

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi	$\frac{(\text{Jumlah Koperasi Tahun 2022} - \text{Jumlah Koperasi Tahun 2021}) \times 100\%}{\text{Jumlah Koperasi Tahun 2021}}$

Kinerja sasaran 1 : “Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi” diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Jumlah Koperasi Tahun 2022 dikurangi Jumlah Koperasi Tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah koperasi Tahun 2021 dikalikan 100%. Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 3,05% dari target 2%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk capaian sasaran 1: “Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi” pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 1

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2021	TAHUN 2022			TARGET AKHIR	CAPAIAN s/d 2022 TERHADAP TARGET 2022 (%)
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pertumbuhan koperasi	2,67	2	3,05	152,5	2	100

Analisis Ketercapaian Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi” adalah sebagai berikut:

- Tercapai 3,05%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 152,5%, terlampaui.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 2,67%, terhadap target tahun lalu sebesar 2% terdapat peningkatan sebesar 114,23%
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan sasaran program meningkatnya Koperasi yang diawasi dan diperiksa mempunyai Indikator persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi dibagi jumlah koperasi Provinsi dikali seratus persen Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(20/102) \times 100\% = 19,61\%$ dari target 0,72% atau sebesar 2723%. Capaian ini didukung oleh Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi kemudian dihitung rerata validitas setiap

parameter tersebut dalam persen.

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan sasaran program meningkatnya Koperasi yang sehat mempunyai Indikator Persentase Koperasi yang sehat formula perhitungan indikator ini adalah jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi Provinsi dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(19/102) \times 100\% = 18,63\%$ dari target sebesar 0,45%. Capaian ini didukung oleh Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kemudian dihitung rerata validitas setiap parameter tersebut dalam persen.
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan sasaran program meningkatnya Koperasi yang diberdayakan mempunyai Indikator Persentase Koperasi yang diberdayakan formula perhitungan indikator ini adalah jumlah koperasi yang diberdayakan dibagi jumlah koperasi Provinsi dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(30/102) \times 100\% = 29,41\%$ dari target sebesar 1,89%. Capaian ini didukung oleh Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kemudian dihitung rerata validitas setiap parameter tersebut dalam persen.

Tabel III.5. Formula Perhitungan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR/FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	Persentase pertumbuhan koperasi (Jumlah Koperasi Tahun 2022 dikurangi Jumlah Koperasi Tahun 2021 dibagi Jumlah Koperasi Tahun 2021 x 100%) = $(1.150 - 1.116) / 1.116 \times 100\% = 3,05\%$	2	3,05	152,5

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kegiatan Peningkatan kepatuhan Koperasi turan perundang-undangan
2.		Kegiatan Pengawasan Koperasi

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Adanya regulasi dan kebijakan Nasional/Daerah terkait urusan Koperasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampumengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Adanya Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Adanya dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN.
- d. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Terlambatnya pengesahan APBD perubahan, sehingga banyak kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi tertunda dan tidak dapat dilaksanakan.
- b. Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya refocusing anggaran yang sering terjadi.
- c. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium jabatan fungsional

3.1.2. Sasaran Kinerja :

Kinerja sasaran 2 : “Meningkatnya Pertumbuhan UKM” diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan UKM; Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Kinerja 2

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	$\frac{(\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022} - \text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021}) \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021}}$

Kinerja sasaran 2 : “Meningkatnya Pertumbuhan UKM” diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022 dikurangi Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah Usaha Kecil Tahun 2021 dikalikan 100%. Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah 10,61% dari target 0,014%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk capaian sasaran 2 : “Meningkatnya Pertumbuhan UKM” pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.7. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2021	TAHUN 2022			TARGET AKHIR	CAPAIAN s/d 2022 TERHADAP TARGET 2022 (%)
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pertumbuhan UKM		0,014	10,61	100	0,014	100

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan UKM adalah sebagai berikut:

- Tercapai 10,61%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100%, terlampaui.
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan sasaran program meningkatnya UMKM yang diberdayakan mempunyai Indikator persentase UMKM yang diberdayakan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah UMKM yang diberdayakan dibagi jumlah UMKM keseluruhan dikali seratus persen Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(37/3208) \times 100\% = 1.14\%$ dari target 0,29% atau sebesar 393.10%. Capaian ini didukung oleh Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku kemudian dihitung rerata validitas setiap parameter tersebut dalam persen.
- Program Pengembangan UMKM dengan sasaran program meningkatnya Usaha kecil yang dikembangkan, mempunyai

Indikator Persentase usaha kecil yang dikembangkan usahanya. Indikator ini adalah jumlah UKM yang dikembangkan dibagi jumlah UKM dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(215/3208) \times 100\% = 6,70\%$ dari target sebesar 0,88% atau sebesar . Capaian ini didukung adanya tambahan dana DID pada tahun 2022 yang fokus untuk pemberian bantuan peralatan pendukung produksi kepada UMKM serta di dukung oleh Kegiatan Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah, Kemudian dihitung rerata validitas setiap parameter tersebut dalam persen.

Tabel III.8. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	INDIKATOR/FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	Persentase pertumbuhan UKM (Jumlah Usaha Kecil Tahun 2022 dikurangi Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021 dibagi Jumlah Usaha Kecil Tahun 2021 x 100%) = $(3.208 - 2.900) / 2.900 \times 100\% = 10,61\%$	0,014	10,61	100

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kegiatan Penyerahan bantuan peralatan pendukung produksi dan digitalisasi
2.		Kegiatan Bazar UMKM

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Adanya regulasi dan kebijakan Nasional/Daerah terkait urusan Usaha Kecil dan Menengah dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Adanya Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Adanya dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN.
- d. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.



Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Terlambatnya pengesahan APBD perubahan, sehingga banyak kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi tertunda dan tidak dapat dilaksanakan.
- b. Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya refocusing anggaran yang sering terjadi.
- c. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium jabatan fungsional

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	2%	3,05%	100%	281.961.095	252.885.100	92,15%	29.075.995
2.	Meningkatnya pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	0,014%	10,61%	100%	7.798.581.241	3.074.897.191	89,69%	112.608.959
3.	Meningkatnya kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang berkualitas	1,8%	0,217%	12.06%	2.469.783.711	2.357.174.752	95,44%	4.723.684.050
4.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	80			11.762.079.613	10.839.100.308	39,43%	922.979.305
Total Belanja						22.312.405.660	16.524.057.351	74,06%	5.788.348.309

Sumber: *http: SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022*

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2022 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar **Rp22.312.405.660,-**, terealisasi **Rp16.524.057.351,-** atau 74,06% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi **Rp5.788.348.309,-** atau 35,03% yang bersumber dari:

- Sisa belanja keuangan, dimana terjadi pengurangan pegawai karena mutasi
- Sisa Belanja DID tahap 1 dan tahap 2 sebagai upaya penanggulangan dampak inflasi daerah yang turun pada bulan Oktober 2022.
- Efisiensi belanja perjalanan dinas sesuai dengan hasil evaluasi dari Kemendagri
- Efisiensi honor narasumber yang tidak terbayar.

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Si Dulang Babel, untuk memudahkan penyediaan data lengkap UMKM di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. UMKM Bangkit, sebagai gerakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM mulai dari kelembagaan, pendataan, standarisasi produk dan pendampingan pelaku UMKM dan Koperasi
- c. Siwaskop (Sistem Informasi dan Pengawasan Koperasi), yang terdiri dari sistem informasi seputar data dan kegiatan koperasi, kesehatan koperasi dan pemberdayaan koperasi.

3.4 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan:

- a. Juara terbaik II terhadap partisipasi tata kelola data sektoral sebagai penerapan satu data Indonesia, diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

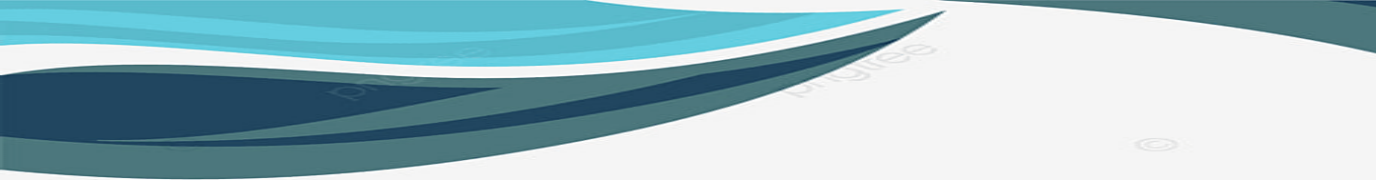
Hasil laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM
2. Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM
3. Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM
4. Belum tersedianya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan UKM yang memadai
5. Rendahnya ketersediaan dan akurasi data KUKM
6. Rendahnya akses informasi perkoperasian dan UKM

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah:

1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan dikemas dalam acara *Coffee Morning*.
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.



Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Tetap Melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota, serta mitra UMKM dan para Stakeholder lainnya;
2. Memaksimalkan tenaga Pendamping UMKM, Konsultan PLUT dan PPKL dalam melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM dan Pengurus Koperasi ;
3. Selanjutnya untuk melakukan pengendalian evaluasi terkait capaian sasaran dan program kerja sebagai bahan penentuan kebijakan yang tepat di tahun ke depan.;
4. Memaksimalkan dukungan anggaran baik dari APBD maupun APBN (dekon/DAK/DID) untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017-2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya skala usaha KUMKM	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi				2%	2%
		Meningkatnya pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM				0.014%	0.014%
		Meningkatnya kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang berkualitas				32%	32%
		Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah				80%	80%

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	: Des. H. YULIZAR ADNAN, M.Si
Jabatan	: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: RIDWAN DJAMALUDDIN
Jabatan	: Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pangkalpinang, November 2022	
PIHAK KEDUA PJ. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 RIDWAN DJAMALUDDIN	 Des. H. YULIZAR ADNAN, M.Si Kepala Utama Madya NIP. 19630717 198903 1 009

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2021



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH**

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX: (0717) 434693, 439333 - PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021**

NOMOR : 700/139/LHE/INPTD/2022

TANGGAL : 28 APRIL 2022



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEKS PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JAL. PULAU BELITUNG NO. 3 KELLUPAN ABENAY - PANGKALPINANG TEL. (0717) 43313 FAX. (0717) 43882

Pangkalpinang, 28 April 2022

Nomor : 700/139 /LHE/INPTD/2022

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2021

Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
di -

PANGKALPINANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja OPD;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas OPD;
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memperoleh nilai sebesar **75,75** dengan kategori **BB (Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal)**. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,64	26,60
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,19	17,19
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,06	11,32
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,72	6,90
e.	Capaian Kinerja	20	13,47	13,54
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,08	75,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja, telah ditunjukkan dalam dokumen perencanaan serta telah dilaksanakan dengan baik sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan ditahun berikutnya.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja, pengukuran kinerja dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester), namun belum sepenuhnya maksimal;
- 2) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja, dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan;
- 2) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan; dan
- 3) Peningkatan dan penilaian kerja serta untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

d. Evaluasi Kinerja

Hasil evaluasi atas evaluasi kinerja, dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Proses evaluasi terhadap program dan tindak lanjutnya belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang sudah dilaksanakan; dan
- 2) Hasil evaluasi program dan rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dalam bentuk langkah-langkah nyata dimasa yang akan datang.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Hasil evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu meningkatkan pencapaian target organisasi yang berorientasi outcome atau hasil serta didukung data yang andal.

f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti

- 1) Hasil evaluasi program dan rencana aksi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dalam bentuk langkah-langkah nyata dimasa yang akan datang; dan
 - 2) Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum dilakukan secara berkala/periodik.
5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
- a. Informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat diandalkan dan digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja; dan
 - b. Dalam proses evaluasi terhadap program dan tindak lanjutnya seharusnya memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang sudah dilaksanakan.

Demikian laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001

Tembusan:

- 1) Menteri PAN dan RB;
- 2) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas/Kantor/Manfaat : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
Periode Evaluasi : Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PEMILAIAN	SKOR	CATATAN
1	2	3	4	5
3. PEMERENCANAAN STRATEGIS (10%)			88,00%	8,80
3.1. PEMERENCANAAN STRATEGIS (10%)			88,00%	8,80
1	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
2	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
3	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
4	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
5	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
6	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
7	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
8	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
9	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
10	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
3.2. KUALITAS RENCANA (5%)			88,00%	8,80
11	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
12	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
13	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
14	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
15	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
16	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
17	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
18	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
19	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
20	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
3.3. KUALITAS RENCANA KINERJA TAHUNAN (10%)			88,00%	8,80
21	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
22	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
23	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
24	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
25	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
26	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
27	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
28	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
29	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
30	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
4. PENERAPAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)			88,00%	8,80
31	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
32	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
33	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
34	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
35	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
36	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
37	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
38	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
39	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
40	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
5. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)			88,00%	8,80
41	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
42	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
43	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
44	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
45	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
46	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
47	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
48	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
49	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1
50	Perencanaan RPJPD telah disetujui	YIT	Y	1

NO	KOMPETENSI DASAR/KOMPETEN	PERILAKU	SKALA	CATATAN
1	2	3	4	5
12	Pencapaian Akad atau Kinerja telah diukur secara berkala sebagai bagian dari kegiatan	ABSCDE	B	0,75
13	Pencapaian Akad telah diimplementasikan dalam perencanaan dan pengorganisasian kegiatan	ABSCDE	B	0,75
14	Terdapat Kinerja yang telah diukur melalui suatu penyusunan (berdasarkan) kinerja sebagai bagian dari kegiatan dalam IV	ABSCDE	B	0,75
Subtotal skor untuk kompetensi ke-1			90,00%	3,00
1	PERENCANAAN PENGUKURAN (25%)		90,00%	2,25
1	Uraian tentang indikator kinerja utama (IKU) sebagai bagian kinerja secara formal	YT	Y	1
2	Terdapat uraian tentang kinerja tingkat satuan II dan IV sebagai bagian dari kinerja atasannya	ABSCDE	A	1
3	Terdapat uraian tentang pengumpulan data kinerja	ABSCDE	B	0,75
4	Indikator Kinerja Utama telah dapat diukur	YT	Y	1
5	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		75,00%	0,94
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	KUR	K	1
6	IKU telah dapat untuk mengukur kinerja	ABSCDE	A	1
7	IKU telah dapat untuk mengukur dengan IKU II	ABSCDE	A	1
8	Uraian indikator kinerja satuan II dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	ABSCDE	B	0,75
9	Indikator kinerja satuan II dan IV telah sesuai dengan indikator kinerja atasannya	ABSCDE	B	0,75
10	Uraian tentang uraian indikator kinerja individu yang terdapat pada IKU unit kerja organisasi/instansinya	ABSCDE	B	0,75
11	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala	ABSCDE	B	0,75
12	Pengukuran data kinerja dapat dilakukan	ABSCDE	C	0,5
13	Pengukuran data kinerja atas Pencapaian Akad dilakukan secara berkala (pulang/pulang ke rumah)	YT	Y	0
14	Pengukuran kinerja telah dilaksanakan menggunakan berbagai informasi	YT	Y	1
15	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (12,5%)		45,00%	0,56
15	IKU telah dilaksanakan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan pengorganisasian	ABSCDE	D	0,5
16	IKU telah dilaksanakan untuk pengumpulan kinerja	ABSCDE	B	0,75
17	Terdapat kinerja satuan II dan IV telah diukur secara berkala	ABSCDE	C	0,5
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja telah diinput ke dalam IV secara berkala dengan menggunakan berbagai cara (pulang/pulang ke rumah & pulang)	ABSCDE	C	0,5
19	IKU telah dapat secara berkala	ABSCDE	C	0,5
20	Pengukuran kinerja atas Pencapaian Akad digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	ABSCDE	C	0,5
Subtotal skor untuk kompetensi ke-2			75,00%	0,94
1	PEMANTAUAN & AKTIVITAS (25%)		90,00%	2,25
1	Laporan Kinerja telah dibuat	YT	Y	1
2	Laporan Kinerja telah dibuat sebagai bagian dari kegiatan	YT	Y	1
3	Laporan Kinerja telah di input ke dalam sistem informasi	YT	Y	1
4	Laporan Kinerja menghasilkan informasi yang dapat digunakan	ABSCDE	B	0,75
5	BENTUK DAN FREKUENSI (12,5%)		75,00%	0,94
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi yang akurat dan sesuai yang bermanfaat untuk	ABSCDE	A	1
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan	ABSCDE	A	1
7	Laporan Kinerja menyajikan informasi dan analisis mengenai capaian kinerja	ABSCDE	B	0,75
8	Laporan Kinerja menyajikan informasi dan analisis mengenai capaian kinerja yang telah dilaksanakan	ABSCDE	B	0,75
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah dilaksanakan	ABSCDE	B	0,75
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah dilaksanakan	ABSCDE	B	0,75

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/040/LHE/INPTD tanggal 31 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2021 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya pemenuhan penyediaan data terhadap dokumen yang belum ada data pada IKK Output capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatkan target kinerja pada indikator presentase koperasi baru dan persentase pertumbuhan UKM masih relatif rendah 	<p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2021 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi terkait perijinan, kepengurusan dan pengawasan koperasi dan UKM. 2. Melakukan pembinaan terhadap pelaku UKM baik yang baru maupun yang lama sebagai upaya pendampingan terhadap pengembangan Koperasi dan UKM 3. Memaksimalkan pendataan lengkap koperasi dan UKM melalui aplikasi Sidulang Babel dan ODS Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk memberikan data yang valid terkait koperasi dan UKM.

Lampiran 5. SK IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
VISI PERANGKAT DAERAH : —
MISI PERANGKAT DAERAH : —
TUJUAN PERANGKAT DAERAH : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN VOLUME USAHA UKUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	2%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	0.014%
3.	Meningkatnya Kualitas SDM UKUM	Persentase SDM UKUM yang berkualitas	1.8%
4.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	80%

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Drs. H. Yulgar Aknan, M.Si
Pembina Utama Madya
NIK: 15630717 198905 1 009

